

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia masih mengalami tahap atau proses untuk membangun perekonomian yang lebih baik agar menjadi sebuah negara yang maju. Indonesia memiliki kondisi geografis yang bermacam-macam di setiap wilayahnya sehingga kondisi ekonomi pun sangatlah beragam, hal ini menimbulkan kondisi ekonomi yang tidak merata pada setiap wilayah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator terpenting untuk menilai efisiensi perekonomian suatu wilayah, karena pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas produksi yang diwujudkan dalam peningkatan pendapatan nasional pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat jika produk domestik bruto kawasan meningkat. Pertumbuhan ekonomi adalah keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi merupakan perubahan struktural yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan menciptakan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan penduduk. Pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang melibatkan bermacam-macam perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan wilayah, pengentasan kemiskinan serta penurunan tingkat pengangguran (Todaro, 2003).

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator ekonomi yang berpengaruh dengan tingkat pengangguran karena pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai peningkatan produktivitas masyarakat melalui penciptaan barang dan jasa, sehingga perlambatan pertumbuhan ekonomi

berarti pengangguran meningkat karena produktivitas angkatan kerja, lapangan kerja berkurang atau lebih banyak kehilangan pekerjaan dalam satu wilayah (Lumi et al., 2021). Pertumbuhan ekonomi sewaktu-waktu akan terus meningkat pada suatu wilayah, ini menunjukkan bahwa pada bahawa perekonomian wilayah tersebut mengalami peningkatan, sebaliknya jika perekonomian wilayah tersebut menurun maka tingkat perekonomian wilayah tersebut tidak mengalami peningkatan dan kemajuan yang baik. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah perekonomian diantaranya adalah masalah pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara tidak hanya didukung oleh kenaikan stok modal fisik dan jumlah tenaga kerja, tetapi juga peningkatan mutu modal manusia yang memiliki pengaruh kuat terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja serta pemanfaatan kemajuan teknologi. Pembangunan manusia ini dapat dilakukan dengan meningkatkan beberapa aspek yang penting bagi kehidupan manusia, yaitu lama hidup, tingkat pendidikan dan tingkat kehidupan yang layak. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga semakin besar permintaan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi, karena dengan meningkatnya produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja dengan demikian terdapat hubungan erat diantara tingkat pendapatan nasional (GDP) yang dicapai dengan penggunaan tenaga kerja, semakin banyak penggunaan tenaga kerja maka tingkat pengangguranpun akan semakin berkurang.

Berdasarkan hukum okun (*Okun's Law*), untuk setiap penurunan 2 persen *Gross Domestic Product* (GDP) yang berhubungan dengan GDP potensial, maka angka pengangguran meningkat 1 persen. Ini menunjukkan bahwa setiap pergerakan penurunan tingkat *Gross Domestic Product* akan meningkatkan jumlah pengangguran di negara tersebut. Begitupun sebaliknya dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dengan baik maka hal ini akan membuat tingkat pengangguran semakin berkurang, dengan kata lain angka pengangguran pada sebuah negarapun akan semakin menurun dari tahun

sebelumnya. Hukum Okun ini menyatakan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengangguran dan GDP (Samuelson, 2004).

Indikator selanjutnya yang berpengaruh terhadap pengangguran juga disebabkan oleh rendahnya tingkat indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup berupa pendidikan, kesehatan dan standar hidup. Kualitas sumberdaya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya pengangguran (Latifah dkk, 2017).

(*Human Development Index*) (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu terobosan dalam menilai pembangunan manusia dari suatu negara untuk menentukan apakah negara tersebut termasuk negara maju, berkembang atau miskin. IPM diukur dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup (Putra, 2018). Indeks pembangunan manusia yang dapat menurunkan tingkat pengangguran salah satunya dapat dilihat dari peningkatan pembangunan infrastruktur pendidikan. Dengan meningkatnya pembangunan pendidikan di suatu negara atau daerah maka permasalahan seperti pengangguran dapat diatasi, hal ini disebabkan karena angkatan kerja dapat masuk ke dalam pasar tenaga kerja sesuai dengan kriteria yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja tersebut.

Dalam ilmu kependudukan (demokrasi), pencari kerja ditempatkan pada kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja. Dilihat dari kelompok umur, umur angkatan kerja adalah 15-64 tahun. Tetapi tidak semua orang berusia 15-64 tahun bekerja. Pengusahaan aktif dan pencari kerja berusia antara 15-64 tahun, sedangkan mereka yang tidak mencari pekerjaan, baik untuk menghidupi keluarga atau sekolah, tidak termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat pengangguran adalah persentase orang dalam pekerjaan yang belum menemukan pekerjaan (Rani, 2021)

Tabel 1.1Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku utara (persen)

WILAYAH	Tingkat Pengangguran Terbuka TPT Kabupaten/Kota (persen)
---------	--

TAHUN	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Halmahera Barat	1,28	4,00	4,29	2,19	3,26	3,39	3,26	3,26	3,45
Halmahera Tengah	7,68	4,90	10,36	3,95	4,59	4,10	6,74	4,23	3,06
Kepulauan Sula	4,82	9,67	3,75	5,86	5,34	4,93	4,90	2,78	2,10
Halmahera Selatan	4,15	2,34	6,31	4,68	4,08	4,58	4,40	1,94	1,51
Halmahera Utara	2,25	4,17	5,81	4,92	5,01	5,89	6,49	8,01	6,06
Halmahera Timur	6,20	4,35	4,03	4,36	3,58	4,48	5,21	6,78	5,20
Pulau Morotai	4,22	3,70	9,97	6,11	5,98	4,92	4,70	6,27	4,35
Pulau Taliabu	9,93	9,27	9,72	6,69	5,48	4,79	4,75	6,10	4,17
Ternate	4,73	8,72	6,87	7,71	5,91	6,06	5,80	5,70	5,77
Tidore Kepulauan	1,81	3,69	4,58	5,95	4,97	4,65	4,95	2,81	2,85
Maluku Utara	3,80	5,29	6,05	5,33	4,77	4,97	5,15	4,71	3,98

Sumber: Bps Provinsi Maluku Utara 2021

Berdasarkan data tabel 1.1. di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Maluku Utara mengalami fluktuatif selama 5 tahun terakhir ini, dimana pada tahun 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka di Maluku Utara mencapai 5,33% kemudian tahun selanjutnya mengalami penurunan menjadi 4,77% . Penurunan ini tidak berlangsung lama, karena pada tahun 2019 mengalami peningkatan hingga tahun selanjutnya, namun pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 4,71% (BPS;2021).

Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku Utara mengalami ketidakstabilan dan selalu mengalami perubahan. Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami perubahan naik-turun gejala ini di sebut dengan fluktuatif. Perubahan yang cukup besar dapat di lihat dari tahun 2017 yang memiliki peningkatan sebesar 5,33% kemudian menurun menjadi 4,77% pada tahun 2018, namun tetap saja terjadi perubahan di beberapa tahun terkhir dan perubahan tersebut bisa berdampak buruk terhadap perekonomian Provinsi Maluku utara. Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang saat ini berada dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Jumlah pengangguran dan pekerja paruh waktu meningkat. Pekerjaan yang berkontribusi terhadap peningkatan

kesempatan kerja merupakan salah satu isu penting ekonomi pembangunan yang dapat dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan.

Berdasarkan penelitian yg dilakukan oleh Latifah, dkk (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka namun tidak signifikan. Muminin dan Wahyu (2017) penelitiannya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. hal ini menandakan bahwa setiap terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi maka akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Mahihody, dkk (2018), dalam penelitiannya tentang pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap pengangguran, menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap pengangguran. Menurut Firdania dan Fivien (2017), dalam penelitiannya menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “ **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengangguran DiProvinsi Maluku Utara Tahun 2009-2023** ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas maka penelitian ini dimaksud untuk mengukur dan menjelaskan bagaimana pengaruh dari pertumbuhan ekonomi dan indeks pembanguna terhadap pengangguran di Provinsi Maluku Utara 2009-2023.

Rumusan masalah yang di angkat yaitu:

1. Seberapa besar pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara?

2. Seberapa besar indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara.
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis, sebagai bahan informasi ilmiah dan peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan tingkat pengangguran di Kabupsten/Kota Provinsi Maluku Utara.
2. Hasil penelitan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam membuat dan memutuskan suatu kebijakan terkait mesalah pengangguran..